

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dapat dilihat dengan seksama pada peristiwa 9/11 tahun 2001 lalu telah merubah garis besar kebijakan dalam dan luar negeri Inggris, bahkan hal ini berakibat pada munculnya *Bush doctrine* dan kebijakan *War on Terrorism* oleh Amerika Serikat. Dalam sebuah artikel yang berjudul Perang Melawan Terorisme: Islam dan Imperatif Demokrasi dijelaskan bahwa sudah jadi sifat dasar negara *super power* seperti Amerika Serikat dengan kepentingannya mempengaruhi agenda global sehingga memaksa negara-negara lain untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri dan pertahanan terhadap Amerika Serikat. Terdapat perubahan *strategic environmental* dengan beberapa karakteristik. Diantaranya, tragedi 9/11 menciptakan dunia baru yang membuat Islam menjadi perhatian dan menjadi ancaman global. Kebijakan *War on Terrorism* Amerika Serikat membuka peluang bagi negara lain untuk menggunakan isu terorisme sebagai ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Inggris merupakan salah satu negara yang dekat dengan Amerika Serikat.¹ Tony Blair yang merupakan Perdana Menteri Inggris telah mendukung kebijakan *War on Terrorism* Bush untuk memerangi teroris. Dalam kebijakan luar negerinya, Tony Blair ikut mendukung dan memberikan bantuan dengan mengirimkan pasukannya ke Afghanistan untuk memerangi pemerintah Taliban karena dianggap melindungi kelompok teroris Al-Qaeda, organisasi yang terlibat dalam peristiwa 9/11. Sedangkan di dalam negeri, pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan ATCSA (*The Anti-Terrorism, Crime and Security*) pada Desember 2001. Keberadaan kebijakan ATCSA yang merupakan respon pemerintah dan parlemen terhadap tragedi 9/11 semakin memperburuk diskriminasi terhadap umat muslim di Inggris baik bagi imigran maupun yang telah menjadi warga negara Inggris.²

¹ Anton Alifandi, “Kebijakan Memerangi Teror”, https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091126_londonterror, diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

² Rizal Sukma, *War on Terrorism: Islam and the Imperative of Democracy*, *Asia Europe Journal* 2, Jakarta, 2004, hal 85-93.

Diskriminasi terhadap umat Muslim di Inggris sebenarnya telah ada sebelum peristiwa 9/11, diskriminasi yang dialami oleh umat Muslim di Inggris dapat ditelusuri sejak kedatangan imigran Muslim besar-besaran dari wilayah Asia Selatan pada tahun 1950-an.³ Keberadaan *Commonwealth Immigrants Act* merupakan salah satu bentuk diskriminasi sosial yang efektif dalam basis sistem imigrasi yang dilakukan pemerintah Inggris terhadap imigran dari negara persemakmuran. Kebijakan ini berusaha membatasi dan memperketat masuknya imigran dari negara-negara persemakmuran Inggris. Selain itu dalam mengajukan aplikasi menjadi warga negara Inggris tampak jelas pengelompokan dan pembagian aplikasi antara anak kelahiran dari orang tua kelahiran negara persemakmuran. Diskriminasi yang dialami oleh umat Muslim di Inggris bersumber dari diskriminasi rasial, dan semua diskriminasi rasial selalu dialami dalam konteks imigrasi yang dilakukan oleh seluruh komunitas. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh umat Muslim adalah istilah *Paki* menjadi *stereotype* bagi orang Muslim, istilah ini yang membedakan antara orang asli Inggris dengan imigran Muslim.⁴

Berbeda dengan diskriminasi rasial yang dialami oleh umat Muslim setelah tragedi 9/11. Poyting dan Mason (2007), dalam tulisannya “The Resistible Rise of Islamophobia” menjelaskan bagaimana peristiwa 9/11 mampu mengubah pola dan perkembangan islamophobia yang terjadi di Inggris, terjadinya transisi dari rasisme anti Arab dan anti Asia, menjadi rasisme anti Muslim. Diantaranya pemerintah Inggris mendeportasi Omar Bakri Muhammad, dan menangkap beberapa tokoh Salafi seperti Abu Qatada dan Abu Hamza Al-Masri karena yang diduga sebagai teroris.⁵

Kondisi di atas menunjukkan terdapat perubahan kebijakan di Inggris terhadap imigran Muslim di Inggris. Sebelum 9/11 pemerintah Inggris memberikan suaka terhadap pelarian politik Islam dari Timur Tengah, yang

³ Nashih Nasrullah, “Islam di Inggris, Lingkungan Paling Islamis di Eropa”, <https://republika.co.id/berita/qfai2g320/islam-di-inggris-lingkungan-paling-islam-is-di-eropa>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

membuat orang-orang dari Timur Tengah menjuluki kota London sebagai *Londonistan*, yaitu sebuah pemikiran yang menempatkan London sebagai tempat paling tepat untuk memulai sebuah program kerja sama bidang ekonomi islam pada wilayah negara-negara di Eropa khususnya. Dalam arti, para pemilik modal memandang Inggris sebagai lokasi paling tepat untuk mengawali ekspansi di Eropa karena tingginya tingkat keterbukaan ekonomi. Setelah peristiwa 9/11, keadaan berubah dengan adanya pemberlakuan ATCSA oleh pemerintah Inggris yang justru membuat para imigran Muslim menjadi ancaman bagi pemerintah Inggris, dan melakukan penahanan bahkan mendeportasi imigran Muslim yang berada di Inggris.⁶

Hal tersebut membuat para masyarakat muslim di Inggris merasa dekat dan ingin menguatkan peran serta keberadaannya dalam komunitas masyarakat Inggris secara luas sebagai wujud dari identitas sosial kelompok muslim. Dalam suatu kelompok sosial, sesama anggota mempunyai rasa saling dekat serta ciri-ciri lain dan bentuk karakter yang tidak sama dibandingkan para perkumpulan kelompok sosial lainnya. Diluar adanya rasa dekat dalam bentuk fisik, kedekatan psikologis dalam kelompok ini juga ikut dibangun yang mana sesama anggota kelompok tersebut mempunyai pemikiran dan tujuan yang sama. Di tengah ancaman islamophobia tersebut, justru sistem ekonomi islam dengan bentuk bank syariah muncul sebagai sistem perbankan alternatif.⁷

Inggris pada waktu itu telah mengambil kebijakan yang tak biasa. Tiga tahun setelah peristiwa 9/11, Inggris memutuskan untuk mengizinkan berdirinya bank syariah di negaranya yang notabene sistem keuangan syariah yang diberlakukan dalam bank syariah, sangat erat kaitannya dengan konsep Islam. Hingga berdirilah bank syariah pertama di tahun 2004 dengan menggunakan sistem profit and loss sharing dan konsep *free interest* di Inggris. Inggris bersamaan dengan berdirinya bank berlandaskan sistem syariah pertama di Eropa yakni *Islamic Bank of Britain* (IBB), menobatkan Inggris menjadi negara di Eropa

⁶ Aisyah, “Perkembangan Perbankan Syariah di Inggris”, <https://www.ibec-febui.com/perkembangan-perbankan-syariah-di-inggris/>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

⁷ Elaine Housby. (2006). Islamic Home Loans in Britain. *ISIM Review*, No. 17, hal. 28-29.

pertama yang menggunakan dasar keuangan syariah di antara negaranegara wilayah Eropa lainnya.⁸

IBB pada waktu itu telah berhasil menjadi figur keberhasilan penerapan ekonomi syariah di wilayah negara Eropa. Semenjak adanya IBB, negara-negara yang ada di wilayah Eropa kemudian mulai membuka diri terhadap adanya sistem ekonomi islam, khususnya perekonomian syariah.⁹ Konsep ekonomi syariah kemudian banyak diadopsi oleh banyak negara Eropa pasca negara-negara tersebut sadar akan tujuan pasti konsep ekonomi syariah dalam mengatasi berbagai persoalan perekonomian, diantaranya adalah persoalan kesenjangan sosial yang semakin parah. Semenjak saat itu, Atmosfir perkembangan pesat bank syariah di Eropa utamanya di Inggris mulai terasa.

IBB semakin menonjol dengan torehan keberhasilannya, yani pada tahun pertama di 2004, total 50.000 nasabah telah mendaftar ke IBB. Melihat hal tersebut, respon positif masyarakat Inggris akan kemunculan sistem ekonomi syariah menjadi bukti nyata eksistensi bank syariah di Inggris. Perbankan syariah nyatanya mampu bersanding dan berkompetisi dengan bank konvensional yang lain pada lingkup penawaran hasil produk dari perbankan yang bagus pada masyarakat meskipun baru terbentuk. Tidak hanya menjadi pionir, bank syariah di Inggris juga mengalami kemajuan. Tingginya jumlah aset yang dimiliki oleh bankbank berbasis syariah di Inggris yang sudah bernilai total sudah USD 18 miliar menjadi bukti lain kemajuan perbankan syariah. Bahkan, pada tahun 2009, Inggris masuk dalam 10 besar keuangan islam dan aset ekonomi islam diantara sembilan negara islam yang lain.¹⁰

Kemajuan juga disertai dengan masuknya bank syariah internasional ke Inggris, diantaranya ialah:

Tabel 1.1
Kemunculan Bank Syariah Internasional di Inggris

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

No.	Nama Bank	Asal Bank	Tahun
1.	ABC International Bank	Bahrain	2004
2.	Ahli United Bank	Bahrain	2003
3.	United Bank of Kuwait	Kuwait	2003
4.	Bank Internasional Al-Baraka	Arab Saudi	1996
5.	Bank Sepah	Iran	2003
6.	Islamic Bank of Britain (Al Rayan)	Britania Raya	2004
7.	Rosette Merchant Bank	Inggris	2003
8.	HSBC Amanah	Hongkong	2003
9.	Standard Chartered	Inggris	2003

Sumber: Aisyah, “Perkembangan Perbankan Syariah di Inggris”, <https://www.ibecfebui.com/perkembangan-perbankan-syariah-di-inggris/>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

Berdasarkan pemaparan data di atas, bisa diketahui bahwasanya banyak bermunculan bank syariah baru di Inggris pasca peristiwa 9/11 terjadi, diantaranya adalah Bank Sepah, Al Baraka, United Bank of Kuwait, ABC International Bank, Ahli United Bank, Bank Al Rayan, serta bank-bank konvensional lainnya yang mempunyai cabang khusus syariah seperti Standard Chartered dan HSBC Amanah.¹¹ Di Inggris, adanya pasar jasa dan keuangan yang memiliki basis ekonomi islam atau syariah di Inggris sudah menjadi magnet bagi para mitra dan investor. Padahal, seharusnya penerapan bank syariah dengan sistem keuangan islam memiliki kecenderungan untuk diimplementasikan di negara-negara dengan sistem ekonomi islam atau negara dengan penduduk mayoritas muslim.

¹¹ *Ibid*

Umumnya bank syariah dengan sistem keuangan syariah dapat diimplementasikan dalam tiga kondisi negara dengan sistem ekonomi yang dianut. Pertama, sistem ekonomi islam penuh yang dianut oleh sebuah negara mempunyai perlengkapan dan aset keuangan yang lengkap dengan berlandaskan aturan atau hukum Syariah Islam. Maka dari itu, bank-bank dengan sistem syariah mempunyai kondisi lingkungan yang adaptif dan sesuai di negara tersebut untuk dapat berkembang dan memulai operasi secara bebas berdasarkan hukum Syariah Islam. Di negara-negara tersebut, perbankan syariah bisa mengoperasikan bisnisnya dengan berlandaskan pada hukum syariah. Kedua, pemerintahan yang menerapkan dualisme sistem ekonomi yakni islam dan non-islam bisa mempunyai berbagai macam perlengkapan infrastruktur penunjang keuangan islam yang telah dimiliki.

Hal yang dapat menghambat dan membatasi kebebasan dari pergerakan sistem perbankan islam adalah adanya infrastruktur keuangan islam yang tidak lengkap. Diluar hal tersebut, pertemuan langsung yang terjadi pada bank konvensional dan bank syariah dapat memaksa bank syariah untuk lebih cepat bekerja, melakukan inovasi dan mengembangkan kreatifitas guna memperoleh konsumen. Ketiga, pemerintahan yang menerapkan sistem ekonomi non-islam maka otomatis mempunyai aset dan infrastruktur keuangan syariah paling tidak lengkap, sehingga dinegara tersebut perbankan syariah dikenai pembatasan dalam lingkungan yang terbatas, sehingga risiko kegagalan politik akan lebih tinggi dari pada negara dengan sistem ekonomi islam atau ganda.

Berdasarkan kecenderungan tersebut, penulis melihat bahwa Inggris seharusnya tidak menerapkan sistem perbankan syariah karena beberapa alasan. Pertama, terdapat fakta terang bahwa Inggris pada tahun 2004 merupakan negara yang masih menganut sistem ekonomi liberal, sehingga dapat dikategorikan memiliki resiko yang cukup tinggi apabila menganut sistem ekonomi islam yang tinggi apabila menerapkan kebijakan perbankan syariah. Diantaranya, ukuran dan kekuatan bank-bank konvensional di Inggris akan berdampak pada persaingan yang ketat. Tidak hanya itu, adanya isu likuiditas yang muncul setiap bank baru berdiri juga menambah friksi penerapan bank syariah di Inggris.

Sementara ekonomi Islam secara filosofis berlawanan dengan sistem ekonomi yang dianut oleh pemerintah Inggris yakni sistem ekonomi liberal atau kapitalisme, hal tersebut diperkuat dengan adanya perspektif bunga yang merupakan salah satu bentuk pertentangannya. Belum lagi adanya prinsip dari sistem ekonomi Islam yang hasil berupa adilnya keadaan sosial dan distributif dengan menjadikan masyarakat luas pada umumnya sebagai objeknya utamanya. Hal ini berlawanan terhadap sistem yang ada pada perspektif ekonomi liberal dengan lebih mengutamakan kebebasan privat serta individu. Sementara ekonomi Islam secara filosofis berlawanan dengan perspektif sistem ekonomi liberal yang telah sejak dulu diadopsi oleh pemerintah Inggris, salah satu letak perbedaannya terdapat pada perspektif bunga

Kedua, sensus penduduk pada tahun 2001 menunjukkan bahwa jumlah umat muslim di Inggris sebesar 1,591,000 atau sekitar 2.71% dari total penduduk Inggris yang membuktikan bahwa umat muslim merupakan golongan minoritas di Inggris. Inggris memiliki kebijakan yang tidak biasa.¹² Sebagai negara sekuler yang terkenal, Inggris memutuskan untuk memperkenalkan sistem keuangan syariah di negaranya yang memang sangat erat kaitannya dengan konsep Islam. Padahal, penerapan kebijakan bank syariah dengan sistem keuangan islam memiliki kecenderungan untuk diimplementasikan di negara-negara dengan sistem ekonomi islam atau negara dengan penduduk mayoritas muslim.

Respon masyarakat Inggris sendiri terhadap bank syariah cukup memiliki hasil positif. Pada tahun 2014 bulan Februari, *Muslim Village* memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh organisasi independen yakni “2Europe” mengenai penilaian dan sudut pandang masyarakat Inggris tentang perbankan Islam. *Polling* tersebut dilakukan terhadap 300 orang responden baik warga muslim maupun non muslim Inggris dengan metode wawancara melalui telepon pada Agustus 2013. Hasil survei menunjukkan yakni sejumlah dua pertiga responden tersebut adalah warga muslim dan non-muslim nasabah dari Islamic Bank of Britain (IBB). Jajak pendapat tersebut menyatakan bahwa 66% dari

¹² Humayun Ansari. (2003). *Muslim in Britain*. Minority Right Group. London. Hal 2.

responden memiliki kepercayaan terhadap sistem ekonomi islam yang cocok bagi perekonomian masyarakat Eropa seperti Inggris. Selanjutnya 65% responden memahami bahwa bank konvensional dan bank syariah memiliki cara kerja yang berbeda. Lalu dari 60% responden sepakat bahwa sistem perbankan syariah relevan terhadap semua Terakhir, dari 57% responden mengetahui bahwa tidak ada bunga pada sistem perbankan syariah dan lebih menawarkan bagi hasil.¹³

Jajak pendapat diatas menemukan bahwa masyarakat Inggris yakin dengan sistem ekonomi islam yang dapat berlaku kepada semua agama dan keyakinan. Masyarakat Inggris juga berkeyakinan bahwa sistem ekonomi islam adaptif untuk dapat diterapkan oleh masyarakat modern utamanya di negaranegara Eropa. Dari hasil survei tersebut menawarkan program yang positif untuk pengembangan bank-bank syariah di Inggris, bahwa terdapat warga Muslim di Inggris yang memerlukan layanan simpanan dengan metode syariah, yakni sekitar satu juta warga. Berdasarkan pemaparan di atas terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti, Pada tahun 2004 Bank Islam Inggris (IBB) didirikan untuk pertama kalinya, Bank Islam pertama di Inggris Raya. Padahal 2004 adalah tahun yang berdekatan dengan peristiwa 9/11.¹⁴

Lalu, sistem ekonomi Inggris yang seharusnya membuat bank syariah tidak memiliki kecenderungan untuk dipakai pada negara-negara dengan dasar system ekonomi liberal maupun negara dengan minoritas muslim seperti Inggris. Ditambah lagi Inggris sebagai negara pionir yang menerapkan sistem ekonomi Islam, memiliki friksi yang lebih besar karena sebagai negara liberal dan sekuler pertama yang menerapkan kebijakan bank syariah ini serta adanya persaingan bank konvensional dan likuiditas. Inggris juga merupakan pusat keuangan dunia di benua eropa dengan pasar keuangan dan infrastruktur yang sudah *well-established* dan *integrated*.¹⁵

¹³ Fuji Pratiwi, Inggris: Keuangan Syariah Cocok Diterapkan di Ekonomi Barat, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/02/08/n0n65r-inggris-keuangan-syariah-cocok-diterapkan-di-ekonomi-barat>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

¹⁴ Enda Mullen, Islamic Bank of Britain, <http://www.birminghampost.co.uk/business/finance/islamic-bank-britain-set-become-7995453>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

¹⁵ *Ibid*

Di samping itu, terjadinya peristiwa 9/11 juga selaras dengan tingginya tingkat islamophobia di Inggris. Namun, fenomena yang terjadi justru sebaliknya, Inggris mengizinkan berdirinya bank syariah pertama di London tahun 2004 dan mengalami perkembangan pesat ditandai dengan terdaftarnya 50.000 nasabah bank syariah ditahun pertama pendiriannya. Oleh karena itu, terdapat hal-hal menarik untuk diketahui lebih dalam mengenai alasan dibalik Inggris menerapkan kebijakan bank syariah di London tahun 2004.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka persoalan yang perlu digali lebih jauh dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Inggris mengeluarkan kebijakan dalam mengizinkan pendirian Bank Syariah pertama di Eropa setelah peristiwa 9/11 tahun 2004?”

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan kebijakan dan latar belakang Inggris setelah peristiwa 9/11 dalam mengizinkan pendirian Bank Syariah pertama di Eropa tahun 2004. Penelitian ini akan berusaha mengungkap penjelasan yang memadai mengenai kondisi Inggris dibalik penerapan kebijakan pendirian bank syariah di London tahun 2004.

I.4 Tinjauan Literatur

Sebelum menganalisis permasalahan di atas, peneliti terlebih dahulu menelaah beberapa studi literatur yang relevan dengan penelitian ini. Kelompok literatur pertama lebih mengacu kepada Para peneliti telah melakukan penelitian yang dilakukan dalam dua dekade terakhir untuk membahas mengenai aspek keuangan syariah yang diterapkan Inggris. Studi literatur yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan keuangan syariah. Wilson (2003), Langah (2008) dan Belouafi et al. (2011) meneliti hambatan dan peluang yang dihadapi dengan penerapan keuangan syariah di Inggris. Aldohni, (2008) di sisi lain, berfokus pada peraturan pemerintah Inggris dalam pengoperasian perbankan syariah dengan menyelidiki isu tentang seberapa efektifnya badan pengawas keuangan Inggris, yakni *Financial Services Authority* (FSA).

Penulis melihat bahwa konteks yang dibahas hanya mengenai konteks dari keuangan syariah. Sedangkan, hambatan yang dijelaskan dalam penelitian tersebut telah dipatahkan secara empiris, bahwa bank syariah di Inggris mengalami kemajuan. Di sisi lain, penulis melihat bahwa peluang berupa investasi dapat penulis lihat sebagai suatu probabilitas. Aldohni (2011) telah mengambil masalah lebih lanjut dengan membandingkan pendekatan yang diambil oleh otoritas Inggris dan mitra Malaysia mereka dalam mengakomodasi perbankan syariah di pasar keuangan masing-masing. Hal ini menurut penulis tidak dapat dijadikan perbandingan karena Inggris dan Malaysia bukan negara yang patut diperbandingkan karena bukan *apple to apple*. Penelitian lain seperti Dar (2002), Mathews dkk. (2003) dan Masood et. (2009) mengeksplorasi produk perbankan syariah yakni pembelian rumah di Inggris.

Mereka berurusan dengan masalah parsial yang berkaitan dengan pembiayaan rumah bagi komunitas Muslim di Inggris. Penelitian ini juga masih mencakup dalam kajian keuangan syariah saja. Peneliti lainnya, yakni Masood et al. (2011) memberikan analisis kebangkitan bank syariah yang tidak terbatas di Inggris saja. Topik utama penelitian tersebut yakni adalah menganalisis kestabilan bank syariah daripada bank konvensional pada kasus inflasi. Kasus ini terjadi pada tahun 2008, sedangkan tidak ada penjelasan mengenai keterkaitan dengan Inggris dalam menerapkan bank syariah pertama kali yakni tahun 2004. Peneliti lain, yakni Elaine Housby (2013) menulis buku tentang keuangan Islam di Inggris. Housby menjawab pertanyaan seperti apa sebenarnya keuangan syariah jika dibandingkan dengan yang dia sebut sebagai keuangan sekuler. Ini hanya sebatas menunjukkan kelebihan-kelebihan bank syariah daripada bank konvensional yang hampir sama dengan peluang-peluang yang dikemukakan peneliti sebelumnya.

Sedangkan Khan (2012) menganalisis persepsi dan kesadaran non-Muslim terhadap keuangan Islam di Inggris dan kriteria pemilihan yang digunakan oleh konsumen dalam memilih lembaga keuangan. Dia menentukan sejauh mana non-Muslim menyadari keuangan Islam di Inggris dan persepsi mereka terhadapnya. Dia menjelaskan aspek perilaku konsumen terhadap industri jasa

keuangan, yang membantu membentuk persepsi atau keyakinan. Dia juga membahas intrinsik serta faktor ekstrinsik yang mempengaruhi persepsi non-Muslim terhadap keuangan Islam di Inggris. Hal ini dapat menjadi referensi penulis mengenai multikulturalisme yang dapat menjadi acuan. Sehingga akan lebih lengkap dalam menjawab rumusan masalah yang akan penulis jawab apabila juga terdapat pembahasan mengenai *recognition* terhadap masyarakat Muslim di Inggris sendiri yang kaitannya dengan kepentingan pada penerapan keuangan Islam.

Dari tinjauan pustaka yang peneliti lakukan tersebut, peneliti menemukan pernyataan yang sama dalam membahas mengenai keuangan syariah di Inggris, mengenai kemunculan dan perkembangannya. Meskipun demikian, dari tinjauan literatur yang didapat, peneliti menemukan *distinct* bahwa penelitian-penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai isu *cultural recognition* masyarakat Muslim yang berkaitan dengan kepentingan Inggris pada penerapan keuangan Islam, utamanya penerapan bank syariah dan kepentingan Inggris dalam mengakomodasi kebutuhan para elit muslim di Inggris dalam mengelola sumber kekayaannya yang notabene mengalir dari aliran dana yang berasal dari SWF (*Sovereign Wealth Fund*) negara-negara di Timur Tengah. Sehingga penulis yakin hal ini akan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kondisi yang menjadi alasan Inggris ketika menerapkan bank syariah pada tahun 2004. Oleh karena itu, peneliti dalam laporan penelitian ini berusaha untuk melanjutkan penelitian secara lebih dalam mengenai latar belakang kebijakan penerapan bank syariah di Inggris pasca peristiwa 9/11 tahun 2004.

I.5 Kerangka Teoritik

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan teoritis Identitas Sosial, Kosmopolitanisme dan Ekonomi Islam sebagai acuan dalam mengerjakan penelitian ini.

I.5.1 Perhormatan Terhadap Identitas Sosial

Social Identity atau Identitas sosial adalah atribut dari seorang individu dimana individu tersebut adalah bagian dari sebuah kelompok sosial. Kemudian atribut ini dipergunakan dalam mengenalkan keberadaan suatu kelompok sosial

serta sebagai faktor pembeda bagi suatu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Anggota dari sebuah kelompok sosial tersebut mempunyai rasa kedekatan dan rasa saling memiliki, hal ini berbeda dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Kedekatan yang ada pada kelompok ini tidak hanya berupa kedekatan fisik saja, seperti intensnya pertemuan dilakukan, tetapi juga dalam kedekatan psikologis dimana rekan-rekan kerja pada sebuah kelompok mempunyai pemikiran dan tujuan yang sama.¹⁶

Selanjutnya *Social Identity Approach* didasarkan pada asumsi dasar tertentu mengenai kodrat manusia dan masyarakat beserta hubungannya. Secara spesifik, masyarakat terdiri atas kategori sosial yang terkait satu sama lain dalam hal kekuasaan dan status. *Social Category* berlandaskan pada pembagian masyarakat yang berdasarkan pada kebangsaan yakni Inggris atau Prancis, ras yakni Arab atau Yahudi, kelas yakni pekerja atau pemilik modal (kapitalis), pekerjaan yakni dokter atau tukang las, jenis kelamin yakni laki-laki atau perempuan, agama yakni Muslim, Hindu, Kristen dan lainnya. Lalu hubungan dari “kekuasaan dan status” berpatokan pada kenyataan bahwa klasifikasi dalam masyarakat mempunyai lebih banyak kekuasaan, kehormatan, dan status dibandingkan dengan yang lain.

Selain itu, ada kategori yang tidak terisolasi, misalnya Kategori B. Dibandingkan kategori yang lain, kategori ini hanya sebagai pembeda dengan kategori yang lainnya. Contohnya adalah kategori sosial kontras dengan label orang "kulit hitam" yang mempunyai makna dan fungsi sebagai pembeda bagi mereka yang berkulit hitam dan yang berkulit putih. Tiap-tiap individu juga merupakan anggota dari kategori sosial yang berbeda, misalnya kategori Buddha yang tidak termasuk dalam kategori khusus seperti yang berada di wilayah Irlandia Utara yakni eksisnya kepercayaan Katolik maupun Protestan.

Diluar itu, pendekatan identitas sosial secara sederhana menjelaskan bahwasanya *social group* tidak dapat dihindari dikarenakan oleh fungsinya yang melengkapi kebutuhan tiap orang dan warga akan keteraturan, struktur,

¹⁶ Abrams, D. , & Hogg, M. A. (1998). Prospects for research in group processes and intergroup relations. *Group Processes & Intergroup Relations*, Sage Journals, No. 1, hal. 7-20.

penyederhanaan, prediktabilitas, dll. Segala sesuatu yang lain harus mencakup analisis historis. Tidaklah mungkin untuk memprediksi atau menjelaskan konten atau tradisi hanya dengan melihat proses *psicology*. Proses psikologis ini memastikan bahwa kelompok tidak dapat dihindari, namun juga tidak secara langsung menentukan klasifikasi kelompok mereka, karakteristik apa-apa saja yang dimiliki, ataupun cara mereka menjalin hubungan dengan kelompok lain.¹⁷

Struktur sosial dirancang guna mengembangkan dan mencukupi kebutuhan awal seperti makan, seks, rumah atau tempat tinggal. Seseorang mendapatkan identitas mereka (citra diri mereka sendiri) mayoritas dari kategori sosial yang dihasilkan dari asal mereka. Individu mempunyai bermacam kategori sosial yang beraneka ragam dan oleh karena itu setiap individu memiliki berbagai identitas yang berbeda. Dapat digambarkan pada dua orang dengan latar belakang keluarga yang sama, namun memiliki perbedaan perjalanan hidup. Oleh karena itu suatu keunikan yang terlihat dari masing-masing individu, menunjukkan bahwa seorang individu ditempatkan secara khas pada struktur sosial tertentu. George Simmel menjelaskannya sebagai berikut:¹⁸

“Kelompok-kelompok yang menjadi anggotanya membentuk suatu sistem koordinat sehingga setiap kelompok baru di mana ia berada lebih tepat dan jelas. Semakin banyak kelompok yang dimiliki seseorang, semakin kecil kemungkinan bahwa kelompok lain menunjukkan kombinasi keanggotaan kelompok yang sama "dipotong" lagi oleh kelompok tertentu (sebagai orang kedua). ”

Kemudian konsep identitas dapat dipahami melalui aktivitas individu dalam kerangka sosial. Identitas adalah mengenai persamaan dan perbedaan antara individu satu dengan individu lain. Tertulis dalam teori Crish Barker, bahwa representasi identitas sosial tergantung dari tindakan yang diambil oleh kelompok sosial, dimana dalam kelompok sosial tersebut terdiri dari individu-individu yang

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. (2008). Teori Sosiologi. Terjemahan Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana, hal 21.

berinteraksi. Keunikan suatu kelompok sosial yang membedakan dengan kelompok sosial lain yang menunjukkan identitas sosial.

Di sisi lain, identitas diri berbeda dengan identitas sosial. Identitas diri merupakan milik dari suatu individu, sedangkan identitas sosial milik kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang berasosiasi. Individu-individu yang memiliki persamaan identitas lalu membentuk suatu kelompok sosial A. Kelompok sosial A memiliki identitas sosial yang menjadi faktor pembeda dengan kelompok sosial B. Identitas sosial dapat menjadi milik suatu individu dan juga milik individu lain dalam satu kelompok sosial. Sedangkan identitas diri hanya dimiliki oleh satu individu, dan tidak dimiliki oleh individu lain. Kelompok sosial yang memiliki identitas sosial disebut juga kategori sosial, yakni sekumpulan individu sebagai satuan sosial berdasarkan ciri yang sama.¹⁹

Melalui metode ini dapat dijelaskan adanya keunikan yang berarti dari masing-masing individu, bahwa tiap individu ditempatkan secara unik pada struktur sosial dan oleh karena itu unik. Identitas diri ataupun identitas sosial muncul melalui kepercayaan diri seseorang dalam membentuk identitasnya. Identitas sosial menitik beratkan pada identitas suatu kelompok yang terdiri dari hubungan dan interaksi antar individu. Identitas sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok juga berfokus pada citra yang terbentuk karena kesamaan identitas. Citra ini dapat berupa citra positif atau negatif. Citra tersebut juga akan membedakan satu kelompok dari yang lain dan ini akan mempengaruhi identitas sosial suatu kelompok di mata masyarakat.

1.5.1.1 Economic Opportunity Inggris dalam Pendirian Bank Syariah di London yang Berbasis Ekonomi Islam

Sejak kemunculan bank Islam pertama di Inggris dan tanah Eropa (2004-2010), model perbankan syariah mampu membuat sistem ekonomi ini semakin populer di skala global karena berbagai keuntungan yang diberikan. Padahal secara filosofi, ekonomi Islam amat sangat bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalisme liberalisme yang dianut oleh Inggris, cara pandang terhadap

¹⁹ *Ibid*

bunga/interest adalah salah satu bentuk ekstrimnya. Selain itu, sistem ekonomi Islam sangat menekankan kepada output berupa keadilan distribusi dan keadilan sosial, dimana masyarakat luas adalah obyek utamanya.

Berbeda dengan sistem ekonomi liberalisme yang menekankan kepada kebebasan individu dan privatisasi. Kenyataannya sekarang ini negara-negara Barat justru berlomba-lomba dalam mengembangkan model perbankan syariah atau sistem ekonomi Islam ini. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya Dana konglomerat timur tengah yang keluar dari Amerika pasca 9/11 disinyalir USD1,5 triliun. Jumlah ini bertambah menjadi USD3 triliun karena wind fall profit kenaikan harga minyak dunia 2008-2009.²⁰ Semua dana ini hanya akan ditempatkan di lembaga dan instrumen keuangan syariah. Berbagai cara ditempuh untuk memuluskan jalan masuk ekonomi Islam atau bank syariah, mulai dari usaha regulasi dan lisensi dari bank sentral, sampai kepada replikasi dan penguatan kelembagaan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah cabang dari ilmu ekonomi yang digunakan untuk membantu manusia dalam pemenuhan kebutuhan dan pencapaian kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Sebagaimana ekonomi islam dipahami sebagai ilmu sosial yang mempelajari kegiatan ekonomi manusia yang berlandas pada nilai-nilai islam, ekonomi islam juga mencakup pada kajian perilaku ekonomi indovidu atau sistem ekonomi pada suatu Negara dengan aturan-aturan syariah dalam islam.

Sementara itu, terminologi ilmu ekonomi Islam telah mengarah pada kajian-kajian ekonomi dan kebijakan sosial yang mencakup semua unsur dasar dari dua cabang keilmuan bisnis dan Islam. Secara filosofis sistem ekonomi islam tidak sama dengan sistem ekonomi konvensional umumnya. Disparitas yang paling fundamental ialah bahwa ekonomi Islam tidak mengenal kepentingan aktivitas ekonomi karena artinya riba sebagaimana dipaparkan pada sumber primer ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada sektor perbankan untuk melihat perbedaan antara kedua

²⁰ Umer Chapra. (1985). *Towards a Just Monetary System*. London: The Islamic Foundation.

perekonomian tersebut. Di bawah ini adalah disparitas antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi islam:²¹

Tabel 1.2

Disparitas Sistem Ekonomi Konvensional & Sistem Ekonomi Islam

Elemen	Konvensional	Islam
Pendekatan Ekonomi	Mikro	Makro
Pengguna Utama	Kreditor dan Investor	Negara, Manajemen, Orang
Kebijakan Akuntansi	Berorientasi pada Tujuan	Berorientasi pada Nilai
Valuasi Aset	<i>Historical Cost Price</i>	<i>Current Exit Price</i>
Penilaian Pendapatan	Pendekatan <i>Revenue-Expense</i>	Pendekatan <i>Aset-Ability</i>
<i>Time Value Money</i>	Ada	Tidak
Periode Waktu	Ada	Ada
Fokus Utama	Pendapatan	Keseimbangan
Konsep Teoritis	Teori Entitas	Teori Hak Milik
Fundamental	Berdasarkan Pendapatan	Berdasarkan Hukum Islam
Bunga Tetap	Ada	Tidak
Orientasi Legalistik	Hukum Konvensional	Hukum Islam
Peraturan Akuntansi	Teknis	Etika
Pasar Modal	Ada	Ada

²¹ Karasik, Theodore, et al. (2007). Islamic Finance in a Global Context: Opportunities and Challenges. *Chicago Journal of International Law* 7(2): hal 379-95.

Dikotomi Bisnis	Ada	Tidak
Moralitas	Tidak	Ada

Sumber: Munawar Iqbal dan Llewellyn, *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*, Edward Edgar Publishing Limited, UK, 2002, hal 8.

Berdasarkan pada buku *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*, bank syariah adalah badan atau lembaga keuangan yang memberikan fasilitas keuangan sesuai dengan aturan dan norma hukum syariah yang ada. Terdapat dua faktor penentu yang menjadi jantung bank syariah yakni kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Tujuan dari sistem bank syariah di sini tidak hanya untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan se semata seperti halnya dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga, tetapi lebih untuk menawarkan keuntungan sosio-ekonomi kepada para nasabah atau pelaku ekonomi yang menggunakan produk perbankan syariah. Karakteristik utama bank syariah diantaranya ialah seperti berikut:²²

1. Ada Dewan Syariah yang bertanggung jawab untuk memantau bank dari perspektif Islam / Syariah.
2. Bank syariah dalam prakteknya selalu menerapkan istilah-istilah Arab yang terdapat dalam fiqh.
3. Fungsi dari lembaga perbankan itu sendiri juga memiliki fungsi amanat, yaitu wajib menjaga keamanan uang yang disimpan dan bertanggung jawab serta siap setiap waktu pada saat penarikan dana berdasarkan pada kesepakatan.
4. Pada perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan kontraktual antara pemodal pemilik modal dengan pemodal pengelola dana dan terjalin kemitraan yang menghasilkan hubungan reksa dana. Melalui cara ini, hubungan eksploitatif antara nasabah dengan bank atau justru sebaliknya dapat dihindari.

²² Munawar Iqbal dan Llewellyn, *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*, Edward Edgar Publishing Limited, UK, 2002, hal 10.

5. Aktivitas bisnis khusus dari bank syariah dibatasi dengan tujuan demi menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif, seperti melarang penumpukan aset yang berlebihan, menciptakan ekonomi yang adil, atau konsep bagi hasil dan bagi risiko, serta menjunjung tinggi moralitas.
6. Aktivitas usaha bank syariah lebih beragam daripada bank tradisional yaitu sistem bagi hasil, sistem jual beli, sistem jual beli, serta penyediaan jasa lainnya, asalkan tidak berlawanan dengan nilai dan prinsip hukum Syariah.

Di tingkat global, perkembangan ekonomi Islam baik sebagai ilmu dan sistem ekonomi telah mendapat banyak tanggapan positif. Guna melatih sumber daya manusia di bidang ekonomi Islam, berbagai pusat studi dan program pendidikan ditawarkan di berbagai lokasi pilihan di seluruh dunia. Begitu pula dengan lembaga keuangan yang telah muncul sejak tahun 1970-an yang bekerja berdasarkan prinsip syariah, yang bersumber dari prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, dan yang berkembang pesat hingga saat ini. Peran pasar keuangan Islam, yang berfungsi sebagai platform penyediaan keuangan dan investasi jangka pendek, harus ditekankan. Demi menjaga mekanisme pendanaan yang diperlukan untuk mendorong stabilitas dalam sistem ekonomi Islam, Instrumen keuangan dan investasi antar bank akan memungkinkan bank syariah untuk menyalurkan dana ke bank-bank yang gagal.²³

Kehadiran ekonomi Islam telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam akan sebuah sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai arus utama perdebatan sebuah sistem ekonomi dunia, terutama sejak usainya Perang Dunia II yang memunculkan banyak negara-negara Islam bekas jajahan imperialis. Dalam hal ini, keberadaan ekonomi Islam sebagai sebuah model ekonomi alternatif memungkinkan bagi banyak pihak, muslim maupun non-muslim untuk melakukan banyak penggalian kembali

²³ Rodney Wilson. (1997). *Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and Muslim Economic Thought*. New York University Press, New York.

berbagai ajaran Islam, khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan antar manusia melalui aktivitas perekonomian maupun aktivitas lainnya.

Perkembangan ekonomi Islam ini mengandung dua hal yang sangat mendasar. Pertama adalah tumbuhnya ekonomi Islam yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional. Kedua, tantangan maupun kontestasi nilai ideologis ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif di tengah keterpurukan sistem ekonomi kapitalisme. Berdirinya sejumlah bank syariah di Inggris adalah berasal dari kontribusi dana-dana timur tengah yang menandai akan naiknya kepercayaan akan sistem ekonomi Islam di Inggris.²⁴ Selain itu Di Inggris juga ada *Islamic foundation* dan Prince Charles yang meresmikan *Oxford Center for Islamic Studies (OXCIS)-Oxford University*. Ada juga *middle east center (Cambridge Univ)* dan *Center for Islamic economics and finance (Durham University)*.

Dari rentang waktu 2004-2010, sistem ekonomi dan keuangan Islam cukup berhasil diterapkan oleh pemerintah Inggris. Terbukti dari awal berdirinya IBB (Islamic Bank of Britain) pada tahun 2004 dan kemudahan proses regulasi dari FSA (Financial Services Authority), sistem ekonomi Islam dan perbankan syariah semakin berkembang pesat di Inggris. Hal ini ditandai dengan kemunculan bank syariah internasional yang masuk ke Inggris (ABC International Bank Bahrain, Ahli United Bank, Barclays Capital, Halal Financial Services, Bank Sepah Iran, BCIB Asset Management Saudi Arabia dan Islamic Mortgages) dan bank konvensional Inggris yang memiliki cabang khusus syariah (HSBC Amanah dan Standard Chartered). Keberadaan bank internasional tersebut dapat dipahami sebagai investor dan mitra yang tertarik dengan pasar keuangan dan jasa yang berbasis syariah di Inggris.²⁵

1.5.1.2 Cultural Recognition

Alat yang ditawarkan oleh Islamic Finance mempunyai asal sejarah yang kokoh dan sudah dipakai oleh beragam masyarakat Muslim di seluruh dunia.

²⁴ El Ashker, Ahmed A. F. and Rodney Wilson. (2006). *Islamic Economics: A Short History*. Brill,

²⁵ *Ibid*

Munculnya *financial inclusions* sebagai jawaban atas adanya *financial exclusion* dapat diartikulasikan sebagai kebutuhan akan pengakuan. Urgensi tuntutan pengakuan identitas ini didasari atas kesadaran akan bahaya *nonrecognition* dan *misrecognition* yang mampu memicu bentuk-bentuk tindakan perlawanan. Dalam perspektif ini, *misrecognition* tidak hanya menggambarkan bentuk kurangnya respek, namun dapat menimbulkan cedera psikologis terhadap korban. Hal ini dikarenakan, pengakuan tidak hanya sekedar rasa hormat yang wajib diberikan, namun pengakuan merupakan kebutuhan vital manusia.

Pengakuan patut diperjuangkan karena di dalamnya terdapat prestis. Pengakuan itu sendiri memiliki beberapa definisi. Pertama, pengakuan merupakan pemahaman, pengertian, dan ketakutan intelektual. Kedua, pengakuan merupakan bentuk identifikasi antar aktor. Ketiga, pengakuan menunjukkan kehormatan antar aktor. Pengakuan pun dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu individu, kelompok, nasional, dan internasional. Pada tingkatan internasional, pengakuan politis merupakan bentuk pengakuan tertinggi sebuah negara karena di dalamnya terdapat pengakuan atas identitas pula.²⁶

K. Anthony Appiah dalam buku *Multiculturalism and "The Politics of Recognition"* mencoba untuk merefleksikan hubungan problematik antara pengakuan atas identitas kolektif, idealisme individu otentik, dan kelangsungan hidup budaya. Menurut Habermas *equal protection* atau persamaan perlindungan tidak hanya cukup dikonstitusikan di bawah hukum konstitusi demokrasi seperti yang digambarkan oleh perspektif Kantianisme. Hal ini dikarenakan, hak tidak membedakan perbedaan kondisi sosial dan budaya secara adil sehingga kesetaraan hak atas wanita, etnik, dan budaya minoritas tidak dapat dipahami secara memadai apabila tidak diadakan diskusi demokratis untuk mengklarifikasi hal-hal relevan mengenai kesetaraan.

Konstitusi menghormati atas keberadaan berbagai identitas budaya, namun tidak menjamin satu pun di antaranya untuk terus ada. Akan tetapi, Appiah kemudian memandang bahwa permintaan atas pengakuan politik dapat

²⁶ El Ashker, Ahmed A. F. and Rodney Wilson. (2006). *Islamic Economics: A Short History*. Brill,

menimbulkan dualisme tersendiri. Pengakuan politik dapat mengubah makna sosial suatu identitas dikarenakan hal ini dapat mengikat tiap individunya secara ketat dan bahwa warna kulit serta jenis seksual tiap individu harus diakui secara politis.²⁷

I.5.2 Peran Wacana Kosmopolitansisme Dalam Politik Global

Di zaman sekarang ini, perilaku masyarakat semakin terbuka dan luas akibat adanya perkembangan teknologi dan tumbuhnya nilai-nilai baru. Perkembangan ini tidak lepas dari adanya aspek globalitas yang telah memodernisasi semua aspek kehidupan yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku manusia ketika melihat dunia. Akibatnya, istilah manusia "kosmopolit" atau "kosmopolitanisme" muncul sebagai sebuah konsep. Istilah ini digunakan untuk mereka yang cenderung positif tentang perbedaan dunia. Definisi kosmopolitanisme hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para sarjana dalam kajian hubungan internasional karena dianggap tidak sesuai dengan konsep nasionalisme di suatu negara.²⁸

Dalam hal ini hubungan atau politik internasional sendiri memiliki makna interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh satu atau lebih negara dengan negara lain secara kolektif untuk memenuhi semua kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh tiap-tiap negara tersebut. Dalam menjalankan hubungan dan relasi tersebut, negara dapat dicirikan sebagai entitas politik yang membutuhkan kode etik dan sistem politik yang menggloabal sehingga relasi yang ada untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dapat tercapai dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selanjutnya, kosmopolitan merupakan teori yang bisa digambarkan sebagai jalan yang harus ditempuh suatu negara untuk menjalin interaksi dalam hubungan internasional.²⁹

Selanjutnya, tujuan penting kosmopolitanisme yang harus dicapai oleh suatu entitas politik adalah kesejahteraan bersama, kemakmuran dan keadilan

²⁷ K. Anthony Appiah. *Multiculturalism and "The Politics of Recognition"*. hal 45.

²⁸ Baiq Wardhani. 2017. *What is Cosmopolitanism*. Materi disampaikan pada kuliah Kosmopolitanisme, Nasionalisme, Fundamentalisme, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Surabaya. 7 Maret 2017.

²⁹ *Ibid*

sosial. Terdapat lingkup yang saling bersinggungan antara kosmopolitan dengan multikulturalisme dan globalisasi. Akan tetapi ketiga hal tersebut memiliki pengertian makna dan konsep yang jelas berbeda. Kosmpolitanisme memiliki berbagai macam definisi, Adam Gannaway menyatakan bahwa kosmopolitanisme merupakan pedoman yang diyakini oleh masyarakat dunia di mana masyarakat berada dalam tatanan kode etik dan politik global. Kemudian Immanuel Kant menjelaskan bahwa kosmopolitanisme adalah teori atau konsep yang dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang manusia sebagai warga dunia atau aktor dalam unit politik dunia.

Pemikiran yang dikemukakan oleh Immanuel Kant cenderung ke arah pemahaman kosmopolitanisme yang lebih modern. Kant bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan eksistensi kosmopolitan universal di mana masyarakat adalah aktor politik yang menjalani kehidupan kelompok yang baik dan sempurna. Sedangkan dalam artikelnya yang berjudul *What is Cosmopolitanism?* menyatakan bahwa konsep kosmopolitanisme pertama kali dipelajari oleh para filsuf Yunani yang tergabung dalam stoic atau stoicism. Kosmopolitanisme pada dasarnya berasal dari kata kosmos yang artinya dunia atau tatanan dunia, dan dari kata polite yang artinya politik. Dalam hal ini kosmos memiliki arti sebagai harmonisasi, dimana perbedaan unsur dan unsur yang ada dapat digabungkan menjadi satu kesatuan yang harmonis guna mewujudkan keseimbangan dunia.³⁰

Sedangkan *polites* dapat diartikan sebagai warga negara atau penduduk yang terkait dengan konstitusi atau aturan kesatuan politik dan secara umum dapat berupa demokrasi, aristokrasi, oligarki, atau konstitusi gabungan. Eric Brown menjelaskan dalam bukunya, *Cosmopolitanism*, bahwa manusia adalah individu yang berperan aktif dalam politik kosmopolitan yang ideal. Menurutnya, ketabahan berpendapat bahwa orang harus bekerja sama untuk membangun keseimbangan dengan meminimalisir adanya kejahatan untuk meningkatkan kebaikan yang ada. Salah satu cara yang dibutuhkan orang untuk mencapai

³⁰ Pheng Cheah. (2006). *Cosmopolitanism*. Theory Culture Society. hal 486.

keseimbangan ini adalah dengan terlibat langsung dalam dunia politik. Brown juga menyatakan bahwa hal itu mudah dicapai melalui politik untuk menyebarkan perdamaian masyarakat melalui negara-kota.

Dalam memahami kosmopolitanisme, terdapat beberapa teori yang juga harus dipahami dan dipelajari yakni, multikulturalisme dan globalisasi. Perbedaan yang jelas antara kosmopolitanisme dan multikulturalisme dan globalisasi adalah bahwa kosmopolitanisme merupakan teori atau konsep yang dapat dipahami sebagai pengetahuan masyarakat sebagai warga dunia atau aktor dalam unit politik global yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan di dunia. Sementara itu, multikulturalisme adalah perilaku yang mengakui dan menghargai keberadaan kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat atau perilaku yang saling mendukung untuk berkontribusi pada konteks kelompok inklusif yang memberdayakan setiap orang dalam masyarakat.³¹

Lebih jauh, globalisasi adalah proses penggabungan identitas individu dan perluasan aliran budaya tanpa terhalang oleh batasan-batasan yang ada. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kosmopolitan adalah suatu teori atau konsep yang dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang manusia sebagai warga dunia atau aktor dalam satuan politik dunia yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan harmonisasi dalam dunia internasional. Maka dari itu, kosmopolitanisme dalam hal munculnya kebijakan pemberlakuan pembukaan bank syariah di Inggris merupakan hasil dari wacana politik global.

I.6 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas maka dapat dibuat hipotesis yaitu analisis kebijakan Inggris dalam mengizinkan pendirian Bank Syariah tahun 2004 setelah peristiwa 9/11 adalah pertama karena adanya upaya *Cultural Recognition* terhadap *Financial Exclusion* masyarakat muslim di Inggris dan yang kedua adalah adanya *Sovereign Wealth Fund (SWF)* dari negaranegara Timur Tengah di negara Inggris.

³¹ Adam Gannaway. 2009. *What is Cosmopolitanism?* MPSA Conference Paper, hal 23.

I.7 Metodologi Penelitian

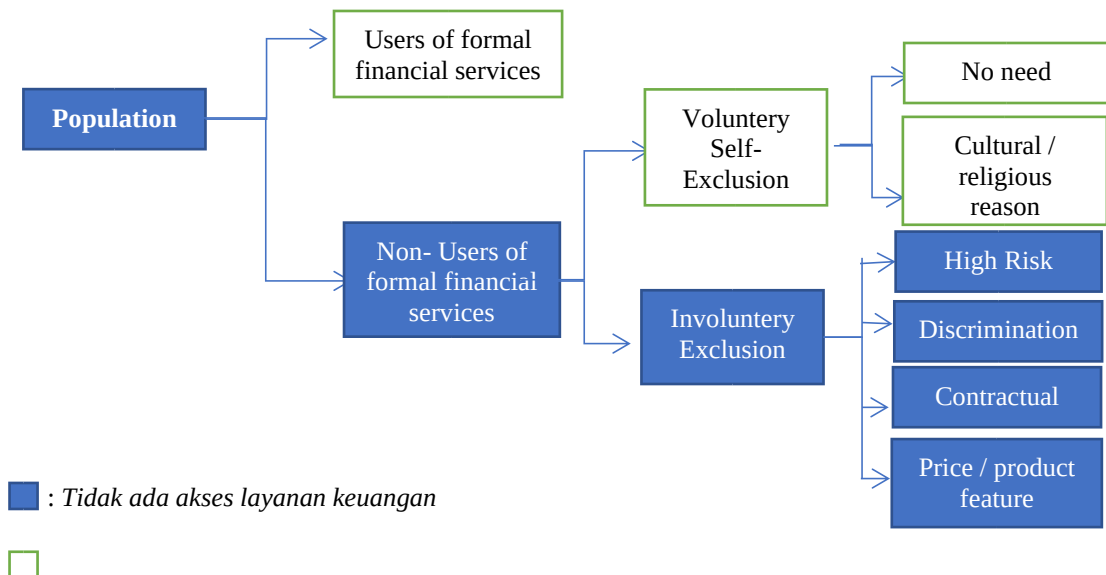
I.7.1 Definisi Konseptual dan Operasional Konsep

I.7.1.1 *Financial Exclusion*

Financial Exclusion atau pengecualian keuangan diartikan sebagai ketidakmampuan, kesulitan atau keengganan dari kelompok tertentu guna melakukan akses pada produk keuangan tradisional. Terdapat berbagai macam hal dan alasan yang menjadi dasar terbentuknya *financial exclusions* dalam masyarakat. Faktor yang dapat membentuk pengecualian finansial tersebut diringkas pada bagan berikut:

Grafik 1.

Faktor-faktor Financial Exclusion



Sumber: The World Bank. (2008). *Financial for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*. World Bank Policy Research Report, Washington DC., hal 29.

Berdasarkan grafik diatas, kondisi hampir tidak ada minoritas Muslim Inggris tergolong kedalam pengecualian tidak sukarela, dikarenakan diskriminasi yang terjadi kepada mereka akibat tidak tersedianya layanan keuangan syariah atau dalam artian hukum Islam yang melarang adanya riba dan bunga. Guna menjawab peristiwa tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pengecualian keuangan, konsep *financial inclusions* disiapkan pada awal tahun 2000an oleh pemerintah Inggris dan bank sentral. Konsep tersebut berlandaskan pada

pelayanan jasa keuangan untuk golongan masyarakat dengan penghasilan rendah atau tidak mempunyai akses kepada jasa pelayanan keuangan konvensional atau dengan kata lain, *financial inclusions* adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah.³²

Pada umumnya, nasabah atau pengakses jasa keuangan tersebut bisa dibagi kedalam dua kelompok: Pertama ialah kelompok yang tidak berhak untuk mengakses sistem keuangan karena alasan kemiskinan atau memiliki pendapatan yang rendah, sedangkan yang kedua ialah kelompok yang keluar dari lingkup sistem keuangan karena sejumlah alasan tertentu seperti budaya dan agama. Sistem keuangan dan ekonomi Islam berkontribusi pada masalah inklusi keuangan dari dua arah berbeda, yaitu yang pertama dengan mempromosikan pembagian risiko kontraktual, yang merupakan alternatif dari pembiayaan berbasis hutang konvensional, dan yang kedua sebagai instrumen khusus redistribusi kekayaan antar masyarakat.³³

Zakat, shadaqah dan wakaf yang merupakan dua alat pembagian risiko dan redistribusi saling melengkapi dan menawarkan bentuk pendekatan yang komprehensif guna mengurai tingkat kemiskinan dan menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat untuk masyarakat secara khusus dan negara secara umum. Dua alat pembagian risiko dan redistribusi tersebut telah digunakan oleh berbagai masyarakat Muslim di seluruh dunia, hal itu dikarenakan alat-alat yang ditawarkan oleh *Islamic Finance* tersebut memiliki akar sejarah yang kuat.³⁴

1.7.1.2 Sovereign Wealth Fund (SWF)

Sovereign Wealth Fund (SWF) atau yang memiliki definisi sebagai dana simpanan negara merupakan instrumen keuangan internasional dari suatu negara yang digunakan untuk menginvestasikan sejumlah uang tertentu pada negara lain. Ian Bremmer berpendapat bahwa SWF merupakan instrumen negara yang dipilih melalui mekanisme kapitalisme negara tersebut. Bagi Bremmer, menimbun dana

³² The World Bank, *Financial for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*, World Bank Policy Research Report, Washington DC., 2008, hal 29.

³³ Mohammed Hersi, *The role of Islamic finance in tackling financial exclusion in the UK*, Doctoral thesis, Durham University.

³⁴ *Ibid*

kekayaan adalah tujuan mengapa SWF dipakai oleh banyak negara yang mempunyai kepentingan politik dan ekonomi di negara dan wilayah lain. Banyak definisi telah diajukan untuk SWF oleh berbagai lembaga keuangan dan ekonom internasional.³⁵ Akan tetapi penulis cenderung menggunakan definisi IMF tentang SWF, yaitu SWF memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan di atas *free rate of return* melalui kumpulan modal atau dana yang dikuasai oleh pemerintah atau instansi pemerintah terkait yang menanamkan modalnya pada aset negara lain.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan jika negara yang menerapkan SWF sebagai instrumen untuk diversifikasi ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. SWF secara implisit atau eksplisit mempunyai tujuan untuk berinvestasi dalam perekonomian lokal atau regional. Bentuk SWF bermacam-macam antara lain ialah dana stabilisasi, cadangan devisa, dana pembangunan, dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Negara bisa memakai SWF guna mendapatkan investasi dari proyek infrastruktur yang sedang sangat dibutuhkan, sementara selain itu yang menggunakan SWF untuk membuat jalur spesialisasi ekonomi, seperti layanan keuangan. Banyak negara dari Timteng seperti Qatar dan UEA (Uni Emirat Arab) dengan jumlah SWF yang cukup besar kemudian mengkhususkan kota kedua negara tersebut sebagai pusat pelayanan keuangan internasional dengan harapan jika kedepannya investasi akan terus mengalir kembali ke negara-negara tersebut.³⁶

SWF menjadi semakin profesional berkat meningkatnya kualitas keuangan dan manajemen sumber daya manusia yang tersedia. Terdapat banyak alasan dalam hal ini, namun negara tidak akan mengganggu modal keuangan mereka untuk tunjangan negatif yang nyata di pasar luar negeri. Kuwait, Uni Emirat Arab, Norwegia, Arab Saudi, Rusia, Chili dan Oman adalah sekelompok negara yang mendistribusikan dana untuk royalti sumber daya alam di SWF. SWF biasanya berasal dari pendapatan sumber daya alam. Selain itu, negara dengan cadangan

³⁵ Bryan J. Balin (2008). *Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis*. Washington: The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS). hal 33.

³⁶ *Ibid*

minimal seperti Singapura dan Cina telah memperoleh basis modal dari surplus anggaran dan akumulasi cadangan devisa.

Pada awalnya dana tersebut dipakai sebagai dana stabilisasi untuk mengurangi *booming* dan *busts* atau tren perekonomian yang bergantung pada komoditas tertentu. Negara-negara kemudian menetapkan aturan yang jelas untuk dana tabungan, strategi investasi, dan skenario yang mana pemerintah kemudian dapat mengakses modalnya guna menghindari kemerosotan ekonomi. Guna menghindari kedua siklus tersebut, mensterilkan aliran masuk mata uang asing dan konsumsi jangka panjang, serta meningkatkan cadangan mata uang, maka negara-negara tersebut kemudian membentuk SWF untuk mengelola dana milik mereka. Sebagian besar karena harga komoditas yang tinggi, SWF diperkirakan memiliki aset lebih dari USD 3 miliar dan diharapkan tumbuh menjadi USD 1215 miliar pada tahun 2015.³⁷

Mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat yakni Larry Summers menjelaskan pendapatnya dalam surat kabar Financial Times: Logika dari sistem kapitalis yang berdasarkan pada pemegang saham telah memimpin perusahaan dalam mengoptimalkan nilai-nilai tindakannya. Hal ini dari waktu ke waktu jelas akan memotivasi pemerintah dalam mengakumulasikan para pemilik saham. Dalam hal ini pemerintah menginginkan bisnis nasional untuk tumbuh secara kompetitif dan secara efektif, hadirnya SWF dalam lingkup bisnis nasional Inggris membuat perusahaan nasional dan SWF dapat bersaing secara positif satu sama lain. Mayoritas ekonom berpendapat bahwa, tanpa adanya peraturan SWF yang memadai maka negara-negara yang menerapkan SWF tersebut dapat dengan mudah memiliki akses rahasia dibidang keamanan nasional. Entah dengan tujuan untuk mengacaukan stabilitas politik atau destabilisasi pasar keuangan internasional.³⁸

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tertulis atau lisan

³⁷ *Ibid*

³⁸ Christopher Balding. (2008). *A Portfolio Analysis of Sovereign wealth Funds*. University of California Press. Hal 27.

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Melalui metode ini diperoleh data dari berbagai literatur yang berbeda kemudian dihubungkan antar fakta yang ada, kemudian permasalahan yang ada dijelaskan dan dianalisis berdasarkan fakta dan disusun secara tertulis, dan kesimpulan akhir diambil dari data dan fakta tersebut.

I.7.3 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dipersempit dalam rentang tahun 2001-2004, karena pada tahun 2001 terjadi insiden 9/11 hingga 2004 secara resmi berdiri *Islamic Bank of Britain* di Inggris yang merupakan Bank Syariah pertama di Eropa. Namun penulis juga mengambil literatur dari rentang sebelum maupun sesudah tahun 2004.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa buku pustaka dan menggunakan data dari situs internet serta referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk penelitian. Jenis teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka dan riset internet. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui penanganan langsung terhadap teks atau data numerik dan tidak melalui pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa peristiwa, orang, atau benda lain.

I.7.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Ini adalah penelitian yang mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi terhadap permasalahan yang diteliti di lapangan. Tujuannya untuk menjelaskan dan menguji hipotesis dari variabel penelitian. Fokus penelitian ini adalah menganalisis hubungan antar variabel.

I.7.6 Sistematika Penulisan

Karya ini terdiri dari lima bab yang kesinambungan tiap babnya diperjelas oleh sub bab, sehingga tercipta karya ilmiah yang sistematis.

BAB Satu memaparkan pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, hipotesis, metodologi penelitian, definisi konsep dan operasional konsep, jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

BAB Dua, mendeskripsikan tentang dinamika sistem ekonomi islam di Inggris sebelum berdirinya Bank Syariah tahun 2004, dilanjutkan dengan pemaparan sejarah dan perkembangan berdirinya Bank Syariah di Inggris.

BAB Tiga, memaparkan tentang *Cultural Recognition* terhadap *Financial Exclusion* masyarakat muslim Inggris dengan berdirinya Bank Syariah tahun 2004.

BAB Empat, memaparkan kebijakan pemerintah Inggris terhadap ekonomi islam dan *Sovereign Wealth Fund (SWF)* dari negara-negara di Timur Tengah setelah pendirian Bank Syariah tahun 2004.

BAB Lima, berisi kesimpulan dari penelitian ini.